

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN
PENGIRIMAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus JNE *Branch Office* Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi

Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Muhammad Shofwan

NPM : 1621030102

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2020 M**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN
PENGIRIMAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus JNE *Branch Office* Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi

Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Muhammad Shofwan

NPM : 1621030102

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Jual beli jasa dalam Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*. Dalam skripsi ini, PT. JNE termasuk dalam jual beli jasa yaitu jasa pengiriman barang. Dalam hal ini penelitian berfokus pada masalah keterlambatan sampainya pengiriman barang. Mengacu pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman barang di PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung dan bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen atas keterlambatan barang oleh PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman barang di PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung dan untuk memahami perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen atas keterlambatan barang oleh PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah konsumen jasa pengguna PT. JNE belum cukup terlindungi karena masih terdapat hak konsumen yang terabaikan apabila ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 angka 8 tentang Hak Konsumen untuk mendapatkan kompensasi sesuai perjanjian dan pasal 7 huruf g tentang Kewajiban Pelaku Usaha yaitu PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung untuk memberikan kompensasi sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Dalam hal ini, PT. JNE memberikan kompensasi atau ganti rugi hanya kepada konsumen yang menggunakan layanan YES dan *Super Speed* sesuai dengan kebijakan perusahaan yaitu pengembalian ongkos pengiriman sesuai tarif sedangkan pengguna layanan reguler dan OKE tidak mendapatkan kompensasi apapun, sehingga dapat dikatakan peraturan PT. JNE tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini juga tidak sesuai dengan Q.S An-Nisaa (4) ayat 29 dan 58 tentang menunaikan amanah sesuai dengan perjanjian dan tata cara dalam bermuamalah haruslah tidak merugikan salah satu pihak sehingga dapat dikatakan belum maksimal.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : "Perlindungan Konsumen atas Keterlambatan Pengiriman
Barang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Studi
Kasus di PT. JNE Branch Office Bandar Lampung)**

**Nama : Muhammad Shofwan
NPM : 1621030102
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
NIP.195904161987031002**

Pembimbing II

**Eti Karini S.H., M.Hum.
NIP.197308162003122003**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukaramo Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Perlindungan Konsumen atas Keterlambatan Pengiriman
Barang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Studi Kasus di PT. JNE
Branch Office Bandar Lampung) disusun oleh, Muhammad Shofwan, NPM:
1621030102, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah di
Ujikan dalam sidang Munasqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan
Lampung pada Hari/Tanggal

Tim Penguji

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.si (.....)

Sekretaris : Hasanudin Muhammad, M.H (.....)

Penguji I : Dsr. Susiadi AS., M. Sos.i (.....)

Penguji II : Prof.Dr.H. Moh. Mukri, M.Ag (.....)

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Mengetahui,

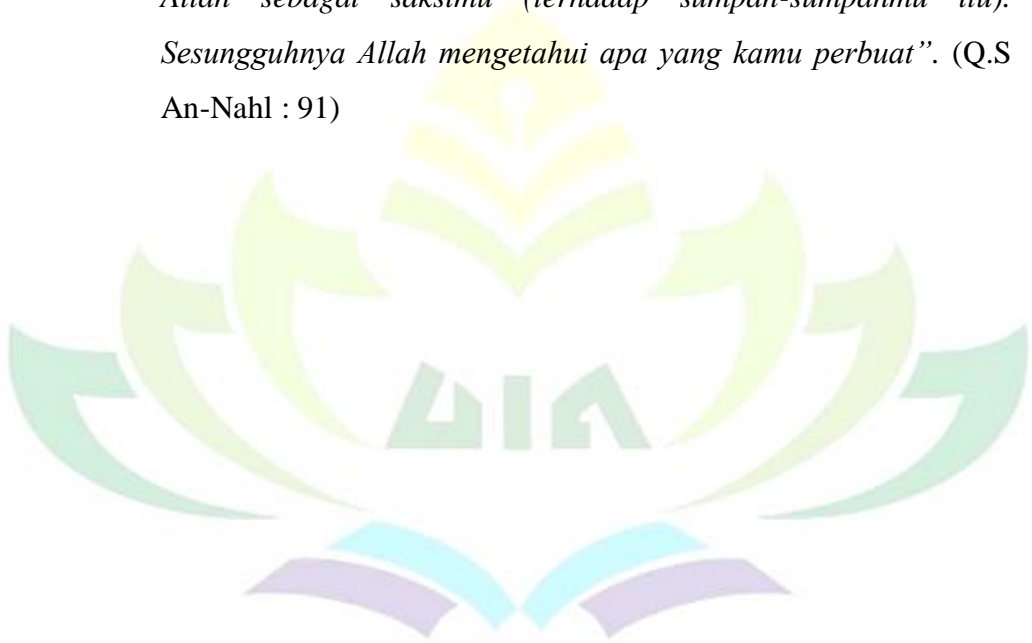
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Dr. H. Khairuddin, M. H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu Telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S An-Nahl : 91)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan senantiasa bershalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dengan ini penulis persembahkan hasil penulisan skripsi kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Damhir Idris dan Ibu Azida yang senantiasa kuhormati dan kubanggakan dalam keadaan apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tuaku, karena berkat doa dan usaha beliaulah langkah demi langkah yang penulis tempuh senantiasa dipermudah oleh Allah SWT, hingga sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi S1 di UIN Raden Intan Lampung. Semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan keberkahan atas setiap langkahnya yang tulus dan ikhlas.
2. Kepada adik-adikku Okto Dwi Putra dan Adis Hirda yang sangat kubanggakan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan doa yang senantiasa menyertai setiap jengkal langkah usahaku.
3. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberi nasehat serta masukkan positif kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang kucintai dan sangat kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tertanggal 12 April 1997 dari pasangan suami istri bernama Bapak Damhir Idris dan Ibu Azida. Penulis dianugerahi nama Muhammad Shofwan yang diberikan langsung oleh kedua orang tua tercinta.

Riwayat pendidikan yang telah penulis selesaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. TK Al-Azhar Bandar Lampung
2. SDN 2 Labuhan Dalam Bandar Lampung
3. SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung
4. SMA Negeri 15 Bandar Lampung
5. Dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Hukum dan Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsidengan judul **"Perlindungan Konsumen atas Keterlambatan Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"** (Studi Kasus di PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Hukum dan Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswanya.
3. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
5. Kepala beserta seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Syariah, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan

Lampung yang telah memberikan bantuan dan menyediakan buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang kucintai dan sangat kubanggakan.
7. Teruntuk partner terbaik Windy Mustika Sari, S.Si yang selalu menemani dan memberikan semangat motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan demi kemajuan penelitian diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis, karena penulisan skripsi ini jauh dari kata ketidaksempurnaan dan masih ada kekurangan.

Dengan demikian, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca pada umumnya dan untuk penelitian selanjutnya. Aamiin ya robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Bandar Lampung, November 2020

Muhammad Shofwan

NPM. 1621030102

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	10
 BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Akad	17
a. Pengertian Akad.....	17
b. Dasar Hukum Akad.....	18
c. Rukun dan Syarat Akad	19
d. Macam-macamAkad	24
e. Berakhirnya Akad	28
B. Jual Beli	30
a. Pengertian Jual Beli	30

b. Dasar Hukum Jual Beli	33
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	37
d. Macam-macam Jual Beli.....	40
e. Pembatalan dan Berakhirnya Jual Beli	47
f. Unsur-unsur Gharar dalam Jual beli	49
g. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	53
h. Etika Jual Beli	54
C. Jasa Pengiriman Barang	56
a. Pengertian Jasa Pengiriman Barang	56
b. Kedudukan Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspedisi)	58
1. Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang	59
2. Perjanjian Pengiriman Barang	60
D. Jasa Pengiriman Barang menurut Hukum Islam.....	61
E. Perlindungan Konsumen	63
1. Pengertian Konsumen	63
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	64
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	64
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	67
F. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen	69
G. Tinjauan Pustaka	69

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bentuk Pengiriman Barang di PT. JNE <i>Branch Office</i> Bandar Lampung	72
1. Sejarah PT. JNE <i>Branch Office</i> Bandar Lampung.....	72
2. Visi dan Misi PT. JNE <i>Branch Office</i> Bandar Lampung.....	73
3. Jenis - jenis Layanan Pengiriman Barang di PT. JNE <i>Branch Office</i> Bandar Lampung	74
4. Struktur Organisasi PT. JNE <i>Branch Office</i> Bandar Lampung	78
B. Sistem Pelaksanaan Pengiriman Barang di PT. JNE <i>Branch Office</i> Bandar Lampung	92
C. Faktor Keterlambatan Pengiriman Barang di PT. JNE <i>Branch Office</i> Bandar Lampung	93
D. Pendapat Para Konsumen Pengguna Jasa PT. JNE <i>Branch Office</i> Bandar Lampung	94

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Perlindungan Konsumen atas Keterlambatan Pengiriman Barang di PT JNE <i>Branch Office</i> Bandar Lampung.....	99
B. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif atas Keterlambatan Pengiriman Barang di PT JNE <i>Branch Office</i> Bandar Lampung	100

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Rekomendasi	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan di Koreksi oleh Pembimbing
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 4	Dokumen Pendukung
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus Cek Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Upaya untuk lebih memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan guna menghindari terjadinya perbedaan penafsiran atau bahkan kesalahan maksud yang diterima oleh kalangan pembaca maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan judul dengan memberikan arti terhadap beberapa penggalan istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. adapun judul dari skripsi ini adalah **"Perlindungan Konsumen atas Keterlambatan Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Studi Kasus di PT. JNE Branch Office Bandar Lampung).**

Adapun beberapa istilah yang terkandung di dalam judul dan akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹

Keterlambatan diartikan sebagai sesuatu hal yang terlambat atau suatu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan menjadi tertunda tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.²

¹ Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Panta Rei, 2005), h. 100.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 778.

Pengiriman adalah suatu cara, perbuatan mengirimkan suatu barang melalui suatu proses atau cara tertentu.³

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁴ Pandangan yang dimaksud adalah pandangan terhadap keadaan sekarang maupun yang akan datang yang mengacu pada pandangan hukum Islam.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui.⁵ Sanksi hukum yang mempengaruhi rutinitas sehari-hari, seperti shalat, perkawinan dan kegiatan komersial yaitu jual beli, jual beli jasa, sewa-menyewa, dan gadai. Dalam hal ini jasa pengiriman barang dapat dikategorikan dalam jual beli jasa.

Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau biasa dikenal dengan *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.⁶

Dapat diketahui bahwa Konsumen pengiriman barang seharusnya sudah dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada praktik yang terjadi, konsumen seringkali masih merasa

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 991.

⁴ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 11.

⁵ Amir Syamsudin, *Ushul Fiqh, Cetakan Kesatu* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Bina ilmu, 2011), h. 21.

dirugikan akibat permasalahan pengiriman barang. Pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen dalam kasus hilang atau rusak sesuai dengan nilai barang yang tertera. Apabila yang terjadi adalah keterlambatan barang yang mana kerugiannya bisa mencakup hal yang imateriil, maka pelaku usaha seharusnya bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak terlalu merasa dirugikan.

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah upaya menyelidiki, meninjau dan mempelajari terkait bentuk perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang jika ditinjau dari pelaku usaha, peran pemerintah sampai pada tahap penyelesaiannya yang mana hal ini akan dilakukan pengkajian lebih mendalam melalui ladsan teoretis hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun memilih judul **"Perlindungan Konsumen atas Keterlambatan Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"** dengan mempertimbangkan alasan subjektif dan alasan objektif sebagai berikut:

1. Subjektif

Judul dan tema yang dibahas dalam skripsi ini sangatlah berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan dalam hal ini merasa perlu untuk mengadakan penelitian terkait bentuk perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang perspektif hukum islam dan hukum positif

dikarenakan permasalahan yang akan diteliti belum pernah dibahas sebelumnya, serta didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan sehingga diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

2. Objektif

Melihat perkembangan di dunia teknologi, sangat berdampak dalam memudahkan pekerjaan manusia di era yang serba praktis. Jasa pengiriman barang ini kerap mengalami lonjakan permintaan yang tinggi di pasaran. Tanpa disadari keadaan ini mempengaruhi pelayanan dalam pengiriman barang, seringkali terdapat kendala yang diakibatkan oleh berbagai masalah teknis dalam proses pengiriman barang. Mulai dari barang yang hilang, rusak atau mengalami keterlambatan sampainya barang sehingga hal ini menarik untuk dibahas lebih jauh dari keseluruhan aspek yang terkait.

C. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak dalam memudahkan pekerjaan manusia di era yang serba praktis. Salah satunya adalah dengan munculnya perusahaan yang menawarkan layanan jasa pengiriman barang baik ke dalam maupun luar daerah. Pihak perusahaan pengiriman barang tersebut menyelenggarakan usahanya dengan cara memberikan layanan pengiriman barang ke tempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu tergantung dari pilihan layanan yang digunakan. Adapun pilihan jenis layanan yang ditawarkan tersebut beragam, sesuai dengan estimasi waktu sampainya paket ke tempat tujuan, mulai dari

seminggu, beberapa hari, hingga satu hari saja (kilat). Di lain pihak, pengguna jasa pengiriman barang ini berkewajiban membayar sejumlah uang tertentu sebagai ongkos untuk mengirim barangnya. Tentunya dalam hal ini harus pula diiringi dengan landasan hukum yang mendasari suatu praktik dalam bermuamalah. Islam tidak hanya memperhatikan *ibâdah* (*hablum minallah*), tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannâs*), yang meliputi berbagai aspek ajaran mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan perekonomian, yaitu lembaga keuangan.⁷ Dalam hal ini, jasa pengiriman barang dapat di kategorikan dalam jual beli jasa.

Jual beli jasa dalam Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*. Secara etimologi, *Ijarah* adalah nama untuk upah (*Ujrah*). Sedangkan secara terminologi, *Ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal di serah-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui.⁸ Pada dasarnya jual beli jasa yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak terlarang. Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan

⁷ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al-Adalah*, Vol. XII No. 3 (April 2019), h. 648.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) cet. II, h. 153.

yang lain, baik dalam urusan pribadi maupun bersama.⁹ Salah satu syarat sah jual-beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling *ridho* (suka sama suka), tanpa ada unsur keterpaksaan atau dirugikan salah satu pihak.¹⁰ Adapun yang dijadikan dasar hukum untuk mendasari kegiatan jual beli dapat kita temukan di dalam Al Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Qs.An Nisa’(4) : 29)¹¹

Menurut Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijelaskan bahwa:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَا

“Sesungguhnya Jual Beli itu haruslah dengan saling suka sama suka”

Berdasarkan ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan salah satu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan kepada suka sama suka.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹² Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur

⁹ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i*(Bandung: Pustaka Setia, 1992), h.22.

¹⁰ Musa Asy’arie, *Islam: Etika & Konspirasi Bisnis*(Yogyakarta: Pustaka Setia, 2017), h.74.

¹¹ Q.S. An Nisa’ (4): 29.

¹² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.¹³ Perjanjian antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi masih sering ditemui kendala- kendala dalam proses pengiriman barang.

Konsumen yang mengalami masalah dalam proses pengiriman terutama dalam keterlambatan barang akan mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil. Beberapa konsumen dari PT. JNE mengalami keterlambatan sampainya barang khususnya wilayah pada PT. JNE *Branch Office*, Bandar Lampung. Dengan pembayaran ongkos kirim lebih mahal karena menggunakan paket 1 hari sampai (kilat) tetapi sampainya barang tidak tepat waktu atau lebih dari 1 hari. Hal ini konsumen seharusnya mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari pihak pelaku usaha yaitu PT. JNE sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen memerlukan jaminan bahwa jika barang tersebut tidak sampai dengan tepat waktu maka ia berhak atas bentuk ganti rugi dari pihak pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada

¹³ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*(Universitas: Brawijaya Press, 2015), h. 42.

masalah bentuk perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang berdasarkan pandangan hukum islam dan hukum positif, yang dilakukan di PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul Perlindungan Konsumen atas Keterlambatan Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di dalam penelitian ini merujuk pada upaya untuk menelaah tentang bentuk perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang dan mengetahui dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif guna mendapatkan solusi terbaik atas problematik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat tersebut.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijabarkan dan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang di PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perlindungan konsumen atas keterlambatan barang oleh PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai rangka untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman barang di PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung
2. Untuk memahami perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap perlindungan konsumen atas keterlambatan barang oleh PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai nilai-nilai keislaman khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, serta penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pelaku usaha yaitu PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan keislaman kepada para pelaku usaha

hususnya PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung, agar senantiasa dapat mengembangkan bisnisnya dalam koridor nilai-nilai keislaman khususnya bagi yang menganut agama Islam dan pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang, serta mampu memberikan nilai-nilai positif bagi pihak-pihak lain yang terkait.

b. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat dalam menambah wawasan keislaman dan pengetahuan perundang-undangan tentang perlindungan sebagai konsumen khususnya dalam bidang muamalah, sehingga dengan bertumbuhnya wawasan pengetahuan diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (menggunakan metode wawancara), karena metode kualitatif ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan cenderung menggunakan analisis, metode ini merupakan penelitian yang sesuai dengan data lapangan. Adapun dalam memecahkan masalah penelitian yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berkenaan dengan pengumpulan data yang dilakukan di PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung, menghimpun sejumlah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berkenaan terhadap bentuk perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang. Upaya yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang akurat baik melalui interaksi secara langsung dan melalui media pendukung lain di lapangan dengan pelaku usaha dan konsumen sebagai narasumbernya. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi langsung dan melalui media pendukung lain di lapangan terkait bentuk perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang di PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung, dimana berupaya menghimpun data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dan melakukan pendekatan induktif yang dimaksud yakni upaya yang dilakukan untuk dapat menemukan data-data melalui wawancara secara

langsung dan melalui media pendukung lain dengan pelaku usaha dan konsumen sebagai narasumbernya.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta secara objektif, baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

a. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah karyawan-karyawan di PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung dan konsumen, hasil wawancara, serta observasi dan dokumentasi di PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa buku dan skripsi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

¹⁴ Muhamad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 4.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2000), h. 142.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Penelitian dilakukan kepada semua elemen baik yang ada di wilayah penelitian hingga pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di wilayah penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan beserta atasan PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung, dan konsumen selaku pengguna jasa pengiriman barang yang berjumlah 10 orang, 2 orang Atasan beserta Karyawan dan 8 orang konsumen yang menggunakan jasa PT. JNE *Branch Office* Bandar Lampung

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Obsevasi adalah cara dan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan pengindraan.¹⁶ Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mengamati langsung bentuk perlindungan konsumen

¹⁶*Ibid* h. 227.

atas keterlambatan pengiriman barang di PT. JNE Labuhan Ratu Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau pertanyaan secara langsung untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan keterlambatan pengiriman barang yang sering terjadi di PT. JNE Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.¹⁷

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pengiriman barang dan faktor keterlambatan.

¹⁷*Ibid* h. 137.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Editing

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan editing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses Editing terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

b. Coding

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.¹⁸

c. Sistematis

Sistematika data yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.24.

kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.¹⁹

6. Metode Analisa Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan baik melalui metode kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian yaitu Perlindungan Konsumen atas Keterlambatan Pengiriman Barang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di PT. JNE Labuhan Ratu Bandar Lampung). Kemudian diolah secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku, yang dapat dimengerti dan menggunakan pendekatan pemikiran induktif yaitu yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan mengenai fenomena yang di teliti.

¹⁹*Ibid*, h.103.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.¹

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) daa qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 45.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara yaitu yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan , akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.³

b. Dasar Hukum Akad

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah

a. Surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”. (Q.S Al-Maidah : 1)⁴

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba yang beriman untuk memenuhi Akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila dalam akad

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15.

⁴ Q.S. Al-Maidah (5): 1.

tidak terpenuhi salah satu rukunnya maka transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi akad-akad agar transaksinya menjadi sah.

b. Surah An-Nahl Ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu Telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S An-Nahl : 91)⁵

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitu Allah SWT menjadi saksinya, dan janganlah manusia mengingkari atau membatalkan janji yang telah dibuat.

c. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

1. ‘Aqid

‘Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masingmasing pihak satu orang berbeda dengan

⁵ Q.S. An-Nahl (16): 91.

ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2. Ma'qud 'Alaih

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3. Maudhu' al-'Aqid

Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4. Shighat al-'Aqid

Shighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan

majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁶

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.

- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida' (titipan).

Dalam pelaksanaan akad tidak tergantung terhadap izin dari pihak lain, syarat berlakunya akad dua yaitu: pertama orang yang melakukan akad baik secara langsung ataupun tidak langsung, kedua barang yang dijadikan objek akad harus milik sempurna yang melakukan akad bukan barang gadaian atau hak orang lain.⁷

Berdasarkan unsur yang telah di bahas diatas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*lujum*).

a. Syarat Terjadinya Akad

Sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi batal.

Syarat ini terbagi atas dua bagian:

⁷ Hirsanuddin, *Hukum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta; Genta Press, 2008), h. 9.

1. Umum

Yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.

2. Khusus

Yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

- b. Syarat Sah Akad

Segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya manusia dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur ke mudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*Fasid*).

- c. Syarat Pelaksanaan Akad

Ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

1. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
2. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
3. Syarat Kepastian Hukum (*Luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akan batal atau dikembalikan.⁸

d. Macam-Macam Akad

Macam-Macam Akad Para ulama Fiqh mengemukakan bahwa macam-macam akad bisa dilihat dari beberapa segi. Berikut akan diuraikan macam-macam akad dilihat dari segi hukum, segi hal batalnya, segi akibat hukumnya, akad yang lazim disatu pihak dan tidak lazim di lain pihak, dari segi tetapnya, segi akibat dan tujuannya dan segi sifat objek akadnya.

1. Segi hukumnya

Dari segi hukumnya akad terbagi dua yaitu:

- a. Akad yang dilarang contohnya akad ijon dan judi

⁸*Ibid*, h. 65-66.

- b. Akad yang dibenarkan syara' (akad selain memenuhi rukun dan syarat juga tidak bertentangan atau yang menjadi objek akad bernilai secara syara')

2. Segi sah batalnya

Dari segi sah batalnya akad terbagi dua yaitu:

- a. Akad sah yaitu selain memenuhi rukun dan syarat dan juga tidak terjadi sesuatu yang membatalkan
- b. Disebut akad batal yaitu rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi terjadi sesuatu yang membatalkan

3. Segi akibat hukumnya

Dari segi akibat hukumnya akad terbagi dua yaitu:

- a. Akad nafiz yaitu akad yang seketika mengalihkan status kepemilikannya
- b. Akad wauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki untuk melangsungkan dan melaksanakan akad seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*

4. Akad yang lazim disatu pihak dan tidak lazim di pihak lain seperti akad wadi'ah dan kaffalah

5. Segi tetapnya hukum (nuzumiyahnya)

Dari segi tetapnya akad terbagia dua yaitu:

- a. Akad lazim (tetap) yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan kecuali kesepakatan kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa menyewa
- b. Akad yang tidak lazim yaitu akad yaang bisa dibatalkan secara sepihak contohnya penitipan barang (*wadi'ah*) dan pinjamm meminjam (*ariyah*)

6. Segi akibat dan tujuannya akad

Dari Segi akibat dan tujuannya akad dapat dibagi tiga yaitu:

- a. Akad dengan pemberian hak milik dan imbalan atau tidak contohnya akad dengan imbalan yaitu ganti (*muawaddoh*) dan akad tanpa imbalan yaitu *tabarr*)
- b. Akad pengguguran atau pelepas hak contohnya akad pengguran hak tanpa imbalan yaitu pembebasan hutang. Akad pengguguran hak atau pelepas hak dengan imbalan memberi ampunan dalam kasus *jarimah qashas*
- c. Akad perserikatan

7. Segi sifat objeknya

Dari Segi sifat objeknya, akad terbagi dua yaitu:

- a. Akad yang objek akadnya berupa benda
- b. Akad yang objeknya non kebendaan⁹

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 112-116.

8. Segi maksud dan tujuannya

Dari segi maksud dan tujuannya:

- a. Kepemilikan
- b. Meghilangkan kepemilikan
- c. kemutlakan yaitu seseorang mewakili dengan mutlak kepada wakilnya
- d. Perikatan yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas (orang gila)
- e. Penjagaan¹⁰

9. Segi perwujudan akad

- a. Dalam keadaan *muwadh'ah (taljiah)* yaituu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya, hal ini ada tiga bentuk yaitu:
 1. Bersepakatan secara rahasia sebelum melakukan akad
 2. Mu'awadlah Terhadap benda yang digunakan untuk akad
 3. Mu'awadlah pada pelaku (*isim musta'ar*)
- b. Halz ucapan-ucapan yang dikatan secara main-mai, mengolok-olokk yang tidak dikehendaknya adanya akibat hukum dari akad tersebut¹¹

¹⁰ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 67.

¹¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 51.

5. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya, *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengancara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadist Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam

khiyar pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).¹²

5. Pada akad *ghair lazim* yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti ada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang *ghair lazim* pada satu pihak dan *lazim* pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang. Pembatalan yakni ketika akad rusak, adanya *khiyar*.
6. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
7. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
8. Karena kematian.¹³

¹²*Ibid*, h. 100.

¹³Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*..., h.70.

B. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

- 1) Menurut Bahasa (etimologi), jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.¹⁴

Jual beli berarti:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.

Kata lain dari Ba'i (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah:

...يَرْجُونَ جَزَاءً تَبَرًا. (فاطر:)

“Mereka mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.

- 2) Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat:

- a) Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.

- b) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah:

مُقَابَلَةُ عَالٍ تَمْلِكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

- c) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah:

¹⁴Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَتُّكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud adalah ijab dan qabul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.¹⁵ Menurut hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran milik secara tetap.¹⁶ Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.¹⁷ Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹⁸ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.¹⁹ Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.²⁰

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

¹⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 94.

¹⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 26.

¹⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 101.

¹⁹ Ismail, *perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 135.

²⁰ Pasal 20 ayat (2), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, yang dikutip oleh mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 167.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).²¹

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara' adalah *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.²² Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah perbuatan pembeli.²³

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Dalam hal ini terjadilah, peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Jual beli merupakan istilah dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli adalah

²¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cetakan ke 4: Permatanet Publishing, 2016), h. 103.

²² Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 71.

²³ Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.²⁴ Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehan nya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadist Nabi.²⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

1. Dasar dalam Al-Qur'an

a. Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Qs.Al-Baqarah (2) : 275)²⁶

b. Surah Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli" (Qs.Al-Baqarah (2) : 282)²⁷

c. Surah Al-Baqarah ayat 198:

²⁴ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2010), h. 191.

²⁶ QS.Al-Baqarah (2) : 275.

²⁷ QS.Al-Baqarah (2) : 282

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”(Qs.Al-Baqarah (2) : 198)²⁸

d. Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (Qs.An Nisa’(4) : 29)²⁹

2. Dasar dalam AS-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari AS-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

a. Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيْ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ

قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah saw bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”.

²⁸ Qs.Al-Baqarah (2) : 198

²⁹ Q.S. An Nisa’ (4): 29.

- a) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
قَالَ لَتَأْجُرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

*“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi Saw bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, Shodiqin dan Syuhada”.*³⁰

C. Dasar Hukum Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan-bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³¹

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.³² Para ulama fiqh dari dulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua untuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang

³⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.23-24.

³¹Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60.

³²Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

mengharamkannya.³³ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasullulah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.³⁴

Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْأَمَّا قَامَ لَيْلٌ عَلَى مَنْعِهِ

“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.³⁵

³³Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*...., h. 127.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , Jilid, Ke 3, Cet. Ke 4, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 46.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h.45.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a.** Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli.
- b.** Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c.** Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.³⁶

2. Syarat Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu juga sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.³⁷

Adapun syarat jual beli antara lain:

a) Syarat subjek jual beli (penjual dan pembeli)

(1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang

Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh

³⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., h.102.

³⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 77.

karena itu tidak boleh sekalipun menjual harta miliknya.

Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya”(Q.s An Nisa’ (4) : 5)³⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. ‘illat larangan tersebut karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil tidak sah melakukan ijab dan qabul.³⁹

(2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah AWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

³⁸ Q.S An Nisa’ (4) : 5.

³⁹ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*..., h.74-75.

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.*⁴⁰

b) Syarat yang terkait *ijab* dan *qabul*

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Menurut ulama yang mewajibkan lafadz, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain:

- (1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- (2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- (3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti kata-katanya, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
- (4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁴¹

⁴⁰Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h.105-106.

⁴¹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.35.

c) Syarat barang yang diperjualbelikan

- (1) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“Jangan lah engkau jual barang yang bukan milikmu”*.
- (2) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*.
- (3) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan atau burung yang berada di awang. Karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.⁴²

d. Macam-macam Jual Beli

1. Jual Beli *Shahih*

Jual beli yang diisyaratkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli shahih

⁴²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., h.104.

menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.⁴³ Jadi jual beli sah dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu diisyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁴⁴

2. Jual Beli *Ghairu Shahih*

Yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini ialah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yakni:

a. Jual beli bathil

Yaitu jual beli yang tidak diisyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak memiliki implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.

(1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya)

⁴³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.71.

⁴⁴Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.121.

Yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya serta anak hewan yang masih dalam perut induknya. Dalam masalah ini golongan hanafiyah merumuskan kaidah “Barang yang diperjualbelikan harus ada”.⁴⁵ Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil.⁴⁶

(2) Jual beli *mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁴⁷

(3) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan

Para ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara, dan ikan yang masih di laut.

⁴⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., h. 71-21.

⁴⁶Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 2007), h.122.

⁴⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fikih al-Islam wa Adillatuh*, Terjemah Abduh Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 31.

(4) Jual beli gharar

Yakni jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya, jual beli buah-buahan yang diongkok atau ditumpuk, di atas songgokan tersebut buahnya kelihatan baik. Namun di dalam nya terdapat buah yang rusak.

(5) Jual beli najis dan benda-benda najis

Para ulama seperti hanafiyah, malikiyah, syafi'iah, hanabilah, berpendapat tidak sah melakukan jual beli *khamar*, babi, bangkai, darah dan sperma karena itu menurut hartanya tidak dianggap harta. Serta semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis.

(6) Jual beli urbun (porsekot)

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah.

(7) Jual beli air, salah satu syarat jual beli

Adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap

benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, dan tanah, karena semuanya itu tergolong *mal mubah*. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Larangan ini tidak berlaku bila *mal mubah* (benda-benda bebas) itu telah dilakukan *ihraz al-mubahat* atau *isti'la' ala al mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk di minum seperti air kemasan dan air isi ulang, terhadap benda-benda tersebut boleh di jual.⁴⁸

b. Jual beli *fasid*

Yaitu jual beli yang diisyaratkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak diisyaratkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak.⁴⁹ Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dan batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-

⁴⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., h. 78-79.

⁴⁹*Ibid*, h. 81.

benda yang haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.⁵⁰ Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk:

- (1) Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan) Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan nama rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.
- (2) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, seseorang berkata “saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan”. Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini bathil. Namun, kalangan hanafiyah menyatakan jual beli ini fasid, karena ada syarat yang tidak terpenuhi.⁵¹
- (3) Jual beli barang *ghaib* atau tidak terlihat ketika akad menurut hanafiyah jual beli ini bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak khiyar ru'yah. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Hanafiyah,

⁵⁰Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., h. 125.

⁵¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., h.83.

malikiyah dan hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan ijarah, rahn, dan hibah yang mereka lakukan, bagi mereka yang ada hak khiyar. Sementara itu, syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

- (4) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai praktik jual beli ini ialah jika seseorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah.⁵²
- (5) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang.
- (6) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Misalnya, seseorang berkata “saya jual rumah saya kepadamu kemudian kamu jual kudamu kepada saya”.
- (7) Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah

⁵²*Ibid*, h.85.

apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.

(8) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah.

(9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup dan sebelah sepatu. Jual beli *fasid* ini boleh berkembang, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan para ulama. Jual beli seperti ini, menurut jumhur ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiyah, hukumnya *fasid*.⁵³

e. Pembatalan dan Berakhirnya Jual Beli

Bathal (*Bathil*) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak

⁵³Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., h.127-128.

diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkat sebagai berikut:⁵⁴

1. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
2. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad bathil tersebut.
3. Akad *bathil* tidak berlakupembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut di dasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.
4. Akad bathil tidak perlu di-fasakh (dilakukannya pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
5. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena faskh adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara *muta'qidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau

⁵⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*...., h. 245-246.

sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*. Para fukaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila.⁵⁵

- a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses-proses waktu.
- b. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
- c. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.
- e. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang *Mauquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika berwenang al-akad tidak mengizinkan.

f. Unsur-unsur Gharar dalam Jual Beli

1. Pengertian *Gharar*

Secara operasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas,

⁵⁵Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.42.

harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar*-nya itu hukumnya tidak boleh.⁵⁶

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Gharar merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi, dalam *gharar* ini kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai suatu yang di transaksikan. *Gharar* bisa terjadi jika kita mengubah suatu yang harusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.⁵⁷

Para ulama fikih mengemukakan beberapa definisi *gharar*:

- a. Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.

⁵⁶Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah, Kaidah-kaidah dan Fatwa Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 116.

⁵⁷Efa Rodiah Nur, "Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern" Al-Adalah. Vol.XII, No 3, Juni 2015, h. 652. (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> (5 Oktober 2019 pada pukul 14:36 WIB).

- b. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).
- c. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.
- d. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

2. Bentuk-bentuk Jual Beli *Gharar*

Menurut ulama fiqh, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c. Tidak ada ketidakpastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.

- d. Tidak ada ketidakpastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.⁵⁸
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- g. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- h. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam suatu transaksi.
- i. Kondisi, objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.⁵⁹

3. Pelarangan *Gharar*

Terdapat dua definisi mengenai konsep *gharar*: pertama *gharar* bermakna ketidakpastian, dan kedua *gharar* bermakna penipuan. Al-Qur'an secara jelas melarang semua transaksi bisnis yang mengakibatkan ketidakadilan dalam segala bentuknya terhadap pihak-pihak yang terkait. Ketidakadilan tersebut dapat berupa resiko/bahaya yang bermuara pada ketidakpastian, penipuan atau keuntungan yang tidak selayaknya. Mahzab Hanafi *Jurist al-Sarakhsi* mendefinisikan

⁵⁸M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*...., h. 147-148.

⁵⁹*Ibid*, h. 149.

gharar sebagai segala bentuk transaksi yang hasilnya tersembunyi.⁶⁰

g. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditunjukkan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

1. Hikmah jual beli yang Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan: ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Dengan usaha perniagaan yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Memenuhi nafkah keluarga: dapat memberikan nafkah keluarga dan rizki yang halal.
4. Memenuhi hajat masyarakat: dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain.⁶¹

⁶⁰Darsono, Ali Sakti, Ascarya Dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 52.

⁶¹Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, h. 13.

5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
6. Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan antar penjual dan pembeli.⁶²

h. Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah suatu yang boleh. Sebab, jika dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali. Karena biasanya jual beli tidak bias terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bias dihindari maka harus dihindari. Ulama malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga keatas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan sepertiga keatas.

2. Berinteraksi yang jujur

⁶²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h. 122.

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

3. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.

5. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seseorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penialan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

6. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan utang.⁶³

Dalam Q.S At-Taubah Ayat 12 Allah SWT berfirman:

⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*...., h. 27.

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, Karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti” (Q.S At-Taubah (9) : 12).⁶⁴

C. Jasa Pengiriman Barang

a. Pengertian Jasa Pengiriman Barang

Jasa pengiriman barang adalah suatu organisasi laba atau perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam pengiriman barang. Akhir-akhir ini jasa pengiriman barang ini sangat diminati penggunaanya, karena dapat dipercaya, dan sangat memuaskan. Kita tidak perlu lagi repot untuk mengantar barang sampai ke tempat tujuan, karena kita hanya perlu pergi ke tempat-tempat cabang dari jasa pengiriman barang itu. Hanya dengan memberikan alamat tujuan yang lengkap, hitung berat barang, dan hitung jarak dari kota awal ke kota tujuan, dari situ dapat dihitung total biaya yang diperlukan untuk pengiriman barang. Semua dilakukan hanya dengan waktu yang singkat.

Bagi penerima, mereka hanya menunggu saja dirumah atau ditempat yang dituju, nanti barang akan langsung sampai ke tempat tujuan tanpa perlu lagi bagi penerima barang untuk mengambil ke

⁶⁴ Q.S At- Taubah (9) : 12.

kantor cabang pengiriman jasa. Karena semakin mudahnya melakukan segala pekerjaan sekarang ini. Saat ini segala semua pekerjaan dapat dilakukan dengan instan, tak perlu lagi repot untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dapat diambil contoh dalam hal pengiriman barang, mungkin dulu kalau ingin mengirim barang kita yang harus repot mengurus untuk keperluan ini itu. Kita harus pergi ke tempat pengiriman barang yang dulu sangat jarang sekali ada, mungkin di tiap kota cuma ada beberapa saja. Tapi karena sekarang segala keperluan dapat dilakukan dengan secara instan, hal tersebut tidak lagi menjadi sulit.

Sekarang ini juga sudah mulai banyak sekali bisnis-bisnis online, yang semua kegiatan jual beli tidak secara langsung, jadi karena kegiatan jual beli yang tidak dilakukan secara langsung akan membutuhkan jasa pengiriman barang, dan yang tidak mungkin apabila dari pihak penjual dan pembeli berbeda pulau, dan tidak memungkinkan bagi penjual untuk mengantar barangnya sendiri ke berbagai pulau. Jadi digunakannya lah jasa pengiriman barang. Yang sekarang sudah mulai banyak dipergunakan masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Apabila ia bertindak atas nama sendiri, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak ekspediter itu sendiri. Sebaliknya, apabila ekspediter dalam menjalankan tugasnya menggunakan nama pihak pengirim, maka

pihak pengirim dapat langsung mengajukan gugatan terhadap pihak pengangkut.⁶⁵

b. Kedudukan Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspedisi)

Hukum Pengangkutan bila ditinjau dari segi keperdataan, dapat kita tunjuk sebagai keseluruhannya peraturan-peraturan, di dalam dan di luar kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)) ; Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)) yang berdasarkan dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang atau orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantara mendapatkan.⁶⁶

Baik di dalam KUHPerdata maupun KUHD, baik yang sudah dikodifikasikan maupun yang belum, yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang atau orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dan perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk di dalamnya perjanjian perjanjian untuk memberikan perantara mendapatkan pengiriman barang atau ekspedisi.⁶⁷

⁶⁵ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, (Jakarta : Rajawali, 1981), hl. 61.

⁶⁶ Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), h. 5.

⁶⁷ *Ibid*

1. Tanggungjawab Jasa Pengiriman Barang

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Perjanjian Pengangkutan bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing kewajiban pihak pengangkut adalah menyelenggarakan barang atau orang ke tempat tujuan dengan selamat. Sebaliknya, sebagai pihak pengirim barang berkewajiban untuk membayar ongkos angkutan yang telah disepakati. Hal ini yang kemudian menjadi hak pihak pengangkut. Sedangkan hak pengirim adalah menerima barang yang dikirim dengan keadaan utuh.

Apabila pihak pengiriman barang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak pengangkut harus bertanggungjawab, artinya pihak pengiriman harus memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengiriman baik karena kesengajaan ataupun kelalaian pihak pengirim. Bentuk nyata dari tanggungjawab pengirim yaitu dengan memberikan ganti rugi atas biaya dan kerugian yang diderita konsumen. Namun hal tersebut tidak berlaku mutlak. Ada beberapa batasan-batasan dalam pemberian ganti rugi tersebut, antara lain:

1. Kerugian itu merupakan kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya kerugian.

2. Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perbuatan dari perjanjian pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan juga terdapat hal-hal yang bukan menjadi tanggungjawab pihak pengangkut. Artinya, apabila timbul kerugian, maka pihak pengangkut bebas dari pembayaran ganti rugi. Beberapa hal yang tidak menjadi tanggungjawab pengangkut adalah:

1. Keadaan memaksa (*Overmach*);
2. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri;
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspediter;
4. Keterlambatan barang ditempat tujuan, yang disebabkan karena keadaan memaksa; dalam hal ini barang tidak musnah atau rusak.⁶⁸

Menurut Saefullah Wiradipraja, ada tiga macam prinsip tanggungjawab pengangkut dalam hukum pengangkutan:

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan;
2. Prinsip tanggungjawab berdasarkan praduga;
3. Prinsip tanggungjawab mutlak.⁶⁹

2. Perjanjian Pengiriman Barang

Perjanjian pengiriman ini, adalah *consensuil* (timbang balik) di mana pihak pengiriman mengikatkan diri untuk

⁶⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, (Jakarta : Djambatan, 1981), h. 35.

⁶⁹ Saefullah Wiradipradja, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, (Yogyakarta : Liberty, 1989), h.19.

menyelenggarakan pengiriman barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan konsumen (pemberi order) membayar biaya atau ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama, di sini dapat dilihat kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan antara lain:

1. Pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat
2. Pihak pengirim (pemakai jasa angkutan) berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang di kirim pada alamat tujuan. Di tempat tujuan barang tersebut diserahkan kepada penerima yang mana dan alamatnya tercantum dalam surat angkutan sebagai pihak ketiga yang turut serta bertanggungjawab atas penerimaan barang.
3. Kedudukan pihak penerima barang karena sesuatu perjanjian untuk berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya sebagai suatu hadiah (pasal 1317 KUH Perdata).⁷⁰

D. Jasa Pengiriman Barang Dalam Hukum Islam

Muamalah merupakan bagian dari rukun Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam hukum muamalat,

⁷⁰ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 67.

Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan oleh Al- Qur'an dan Sunnah. Dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.⁷¹ Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi muamalah bukan saja miniatur dari ulama klasik, melainkan sekarang transaksi tersebut merupakan terobosan baru dalam dunia modern.

Dalam kasus ini, jasa pengiriman barang dapat di kategorikan dalam jual beli jasa. Jual beli jasa dalam Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*. Secara etimologi, *Ijarah* adalah nama untuk upah (*Ujrah*). Sedangkan secara terminologi, *Ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal di serah-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui.⁷²

Ijarah juga bermakna jual beli manfaat atau dapat diartikan juga sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), h. 160.

⁷² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), cet. II ,h. 278.

pemindahan kepemilikan atas barang.⁷³ Objek dalam akad Ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Ijarah merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syari'at Islam. Kegiatan Ijarah ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar kita.

E. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata *consumer* (Inggris Amerika), atau *consument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁷⁴ Pengertian konsumen telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 2 yaitu Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

⁷³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) cet. II. h. 153.

⁷⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h. 22.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷⁵

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁷⁶ Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹ Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

⁷⁵ Abdul Hakim Siagian, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku*, (Medan: Jabal Rahmat 2012), h. 13.

⁷⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 9.

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen.

Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.⁷⁷

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.

⁷⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007), h. 40-41.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

F. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang. Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (contractual liability).

Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui secara luas yang berkaitan dengan penelitian adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Lubis Putri Pratiwi, (2017), 120200021, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PT. Pos Indonesia (Perseroan) Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Paket Pengiriman Barang (Studi Di Kantor Pos

Pematangsiantar), mahasiswi Fakultas Hukum, jurusan Hukum Keperdataan, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, yang dalam penelitiannya tersebut mencakup tentang penegasan terkait perlindungan konsumen yang mana hanya difokuskan kepada kerusakan dan kehilangan barang dengan perspektif hukum positif saja.⁷⁸ Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu lebih memfokuskan penelitian kepada keterlambatan barang dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Putri Firmanda, (2017), 1113048000025, Klausul Eksonerasi dalam Transaksi Jasa Pengiriman Barang Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus Pencantuman Klausul Eksonerasi pada Resi Pengiriman J&T express, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dalam penelitiannya dijelaskan adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian antara konsumen dan pihak perusahaan J&T express tidak selaras dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ganti rugi yang diberikan J&T tidak memenuhi keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan pasal 1236 KUHPdata dan

⁷⁸ Lubis, Putri Pratiwi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PT. Pos Indonesia (Perseroan) Terhadap Kerusakan Atau Hilangnya Paket Pengiriman Barang (Studi Di Kantor Pos Pematangsiantar)" (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2017).

pasal 472 KUHDagang.⁷⁹ Dalam penelitian memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu lebih memfokuskan penelitian kepada klausul eksonerasi dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha itu sendiri sesuai dengan pasal pasal yang berlaku tentang perjanjian pelaku usaha dan keadilan untuk konsumen, namun keduanya tetap memiliki keterkaitan seperti tanggungjawab atau ganti rugi dari pelaku usaha mengenai keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang.

Deni Eka, (2011), 06 140 158, Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Surat dan Barang (Studi Kasus: PT. Pos Indonesia, Cabang Padang), mahasiswa Fakultas Hukum, Program studi Hukum Perdata Ekonomi, Universitas Andalas, Sumatera Barat, dalam penelitiannya dijelaskan tentang penegasan terkait perlindungan konsumen yang mana hanya difokuskan kepada kerusakan dan kehilangan barang dengan perspektif hukum positif saja.⁸⁰ Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas yaitu lebih memfokuskan penelitian kepada keterlambatan barang dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

⁷⁹ Putri Firmanda, "Klausul Eksonerasi dalam Transaksi Jasa Pengiriman Barang Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus Pencantuman Klausul Eksonerasi pada Resi Pengiriman J&T express" (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

⁸⁰ Deni Eka, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Surat dan Barang (Studi Kasus: PT. Pos Indonesia, Cabang Padang)" (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2011).

Ismail, *perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Bina ilmu, 2011.

Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar- Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke 4: Permatanet Publishing, 2016.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Universitas: Brawijaya Press, 2015.

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada media Group, 2012.

Musa Asy'arie, *Islam: Etika & Konspirasi Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 2017.

Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.

Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah, Kaidah-kaidah dan Fatwa Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Pasal 20 ayat (2), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, yang diikuti oleh Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid Ke3, Cet. Ke 4, Bairut: Dar Al-Fikr, 1983.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid Ke 12, Bandung: Alma'arif, 1997.

Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005.

Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

